

Judul : Putri: Parlemen awasi pengelolaan utang negara
Tanggal : Kamis, 28 April 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Putri: Parlemen Awasi Pengelolaan Utang Negara



Putri Komarudin

PANDEMI Covid-19 turut menguji kemampuan keuangan negara-negara di seluruh dunia yang diakibatkan kebijakan fiskal ekspansif untuk biaya paket stimulus dampak pandemi. UNDP bahkan mencatat peningkatan utang negara secara global mencapai 256 persen.

Sementara itu, Indonesia juga mencatat kenaikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen selama pandemi guna membiayai penanganan pandemi dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Putri Komarudin menegaskan peran DPR dalam mengawasi kinerja pengelolaan utang negara melalui fungsi-fungsi parlemen.

“Dua tahun sejak pandemi, peran parlemen dalam penganggaran, pengawasan, dan pembentukan anggaran negara semakin tertantang. Karena kita juga perlu memastikan konsekuensi kebijakan fiskal yang ekspansif ini tidak menghambat pertumbuhan antar generasi. Termasuk, untuk pastikan meski terjadi peningkatan utang negara, manfaatnya dapat terlihat dan dirasakan langsung bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” ungkap Putri da-

lam paparannya terkait Praktik Pengawasan Parlemen terhadap Utang Negara di Indonesia.

Putri hadir sebagai panelis webinar dengan tema *The Role of Parliaments in Public Debt Management and Transparency* yang diselenggarakan National Democratic Institute (NDI) dan Westminster Foundation for Democracy (WFD), kemarin.

Dalam paparannya, Putri juga menjelaskan tantangan yang dihadapi DPR dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Khususnya, pengawasan atas pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2020 yang mengatur kembalinya defisit fiskal APBN di level 3 persen terhadap PDB di tahun 2023.

“Selain itu, menjadi tantangan juga untuk awasi pertumbuhan rasio utang kita yang semakin melonjak hingga 41 persen per PDB di tahun 2021. Walaupun dapat dikatakan masih sesuai dengan ketentuan batas 60 persen, namun kita tetap perlu waspada dan pastikan kemampuan kita untuk membayar utang masih terkendali. Apalagi, mengingat kebutuhan keuangan negara masih sangat tinggi, khususnya dalam pembiayaan PEN dan pembangunan infrastruktur,” lanjut Putri.

Senada disampaikan Anggota Parlemen Zambia Fred Chaatila terkait tantangan parlemen Zambia dalam mengawasi pengelolaan utang negaranya selama pandemi.

“Tantangan yang parlemen kami alami terkait tidak seimbangny kewenangan pemberi pinjaman dan negara sebagai penerima pinjaman. Selain itu, kami juga tidak bisa memanggil pemberi pinjaman luar negeri untuk hadir di sesi parlemen untuk memeriksa perjanjian pinjaman. Padahal, penarikan pinjaman juga memerlukan persetujuan parlemen,” jelas Chaatila. ■ KAL